



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 13 September 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.10 WIB s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas pengelolaan Bandara oleh Badan Usaha Bandar Udara dan permasalahannya
Ketua Rapat	: Roberth Rouw
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II pada hari ini adalah membahas pengelolaan Bandara oleh Badan Usaha Bandar Udara dan permasalahannya.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi pada pengelolaan bandara-bandara yang belum optimal pemanfaatannya.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan kajian terhadap mobilitas masyarakat pengguna layanan jasa kebandarudaraan dalam perencanaan pembangunan bandara baru, diantaranya aspek humanis dan kearifan lokal.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh melalui konsesi kerjasama dengan operator pengelola Bandar Udara dapat terealisasi dengan maksimal.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap komponen penyusun tarif pesawat udara agar dapat menjamin masyarakat mendapatkan harga tiket yang wajar dan terjangkau.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan subsidi terhadap angkutan udara perintis yang menghubungkan pulau-pulau terluar, terdepan dan tertinggal.
6. Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Bandara Kertajati bersama Ditjen Perhubungan Udara dan seluruh stakeholder terkait.
7. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II agar dalam membangun dan mengoperasikan bandar udara dapat melibatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 13 September 2022

KETUA RAPAT,

ROBERTH ROUW

DIRUT PT ANGKASA PURA I,

FAIK FAHMI

PLT DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

NUR ISNIN ISTIARTONO

DIRUT PT ANGKASA PURA II,

MUHAMMAD AWALUDDIN